

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah fenomena nyata yang mungkin tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kemampuan, kesempatan, dan sumber daya. Saat ini, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga sebagai kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perlakuan yang tidak setara terhadap individu atau kelompok.. Kemiskinan disebabkan adanya keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti modal, sarana produksi, pemasaran, peningkatan kuantitas dan kualitas produk, serta sanitasi. Faktor eksternal seperti fluktuasi harga BBM, tarif, dan regulasi lainnya yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa juga berkontribusi, sehingga semakin sulit bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dari segi ekonomi, kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya pendapatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan (Maipita, 2014).

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan dimana terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (basic needs) minimum dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut, nilai kebutuhan dasar minimum tersebut digambarkan dengan garis kemiskinan (imelia, 2012). Dalam definisi yang lebih luas, kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam

memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer kemiskinan meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber keuangan dan terbatasnya informasi.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun. Namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya (Ramdani, 2015).

Kemiskinan menjadi permasalahan utama di Kabupaten Nias Selatan, karena persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi dan termasuk tertinggi di Provinsi

Sumatera Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias Selatan berada di peringkat ke tiga yaitu sebesar 16,39 persen, dibawah Kabupaten Nias Utara, Nias Barat sebesar 21,79, 22,81 persen yang berada di peringkat paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data dari tahun 2006-2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias Selatan termasuk tertinggi karena persentasenya di atas 10 persen. kondisi tersebut tergambar pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nias Selatan.



Sumber : BPS Nias Selatan 2006-2023

Berdasarkan Gambar 1.1 persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan trend cenderung fluktuatif, 2006 persentase penduduk miskin mencapai 37,66 persen, menurun pada tahun 2014 menjadi 17,81 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 19,05 persen, dan tahun 2023 kembali menurun menjadi 16,39 persen, tetapi kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan termasuk tertinggi di Provinsi Sumatera utara maka dikategorikan pola

hubungan instruktif, hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh pemerintah pusat lebih besar. sehingga pemerintah daerah dituntut serta berkewajiban untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan secara maksimal. Pembangunan mempunyai empat bagian pokok yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, perubahan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut (Kunarjo, 2002) proses kemiskinan dimulai dari rendahnya pendapatan kemudia berdampak pada penurunan jumlah tabungan dimana kondisi ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya hidup manusia baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun ekonomi keluarga itu sendiri yang menjadi tidak memadai akibatnya, tingkat produktivitas pun menurun yang pada gilirannya akan menekan pendapatan, menciptakan siklus yang berulang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan tinggi mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk membiayai pembangunan menjadi lebih besar, sehingga mempengaruhi dan menghambat proses pembangunan. Kemiskinan disebabkan ketidaksamaan sumber daya, distribusi pendapatan tidak merata, perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan akses modal. Pengentasan kemiskinan memerlukan rencana serta keputusan yang sesuai dengan kondisi daerah oleh pemerintah, karena peningkatan penduduk miskin akan menjadi beban pembangunan.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut.

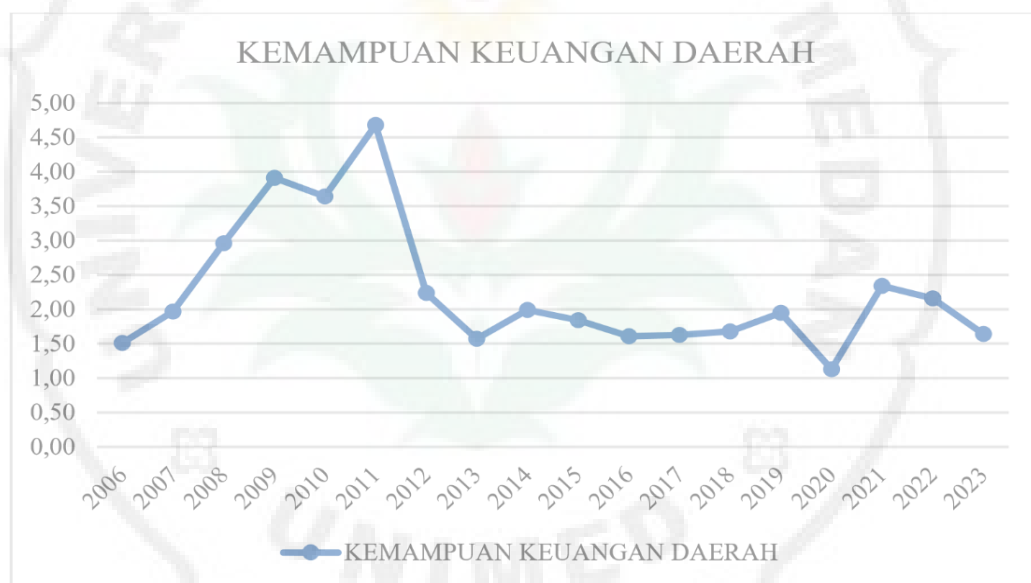
Menurut penelitian (Von Braun & Grote, n.d.) jika desentralisasi diberikan dengan proporsi yang andil dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas sektor publik terhadap kebutuhan masyarakat miskin, desentralisasi yang tidak berhasil dapat mengancam stabilitas ekonomi dan politik dengan dampak negatif bagi penyediaan layanan publik yang sangat relevan bagi masyarakat miskin.

Menurut (Kamaroellah, 2017) derajat desentralisasi merupakan sebuah komponen utama dari pelaksanaan otonomi daerah. Ada 4 elemen termasuk dalam desentralisasi yaitu politik, Derajat Desentralisasi, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan/kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan dengan baik.

Desentralisasi fiskal mempunyai sasaran utama, yaitu melaksanakan aspirasi daerah mengenai penggunaan sumber keuangan daerah, memaksimalkan keikutsertaan masyarakat dalam tahapan pembangunan, meminimalisir kesenjangan, mengoptimalkan tanggung jawab, keterbukaan, pelayanan masyarakat, dan mensejahterakan masyarakat oleh pemerintah daerah, oleh karena itu desentralisasi fiskal paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah.

Pemerintah daerah berwenang untuk mengelola dan mengatur keuangan sesuai ketentuan peraturan serta berhak untuk mengalokasikan pendapatan dan belanja sesuai prioritas pembangunan daerah (Nurhemi & R, 2015). Berikut dapat dilihat grafik kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan dibawah ini.

Gambar 1.2 Grafik Persentase Kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Nias Selatan



Sumber : BPS Nias Selatan 2006-2023

Berdasarkan pada grafik diatas dapat dilihat bahwa kemampuan dan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten nias selatan di atas dapat dilihat bahwa realisasi Grafik di atas memperlihatkan bahwa rasio kemapuan keuangan daerah diNias Selatan tahun 2006 1,51%, kemudia tahun 2011 naik mencapai 468% dan turun pada tahun 2020 mencapai 1,13 hal ini disebabkan karena dampak pandemi kemudia pada tahun 2023 naik menjadi 1,64%. Sehingga dapat dikatakan bahwa besar persentase 18 tahun anggaran berada pada persentase 5%. Jika diukur

dengan skala interval, maka pada skala 0,00 - 10,00 dapat diartikan bahwa rasio derajat kemampuan keuangan daerah nias selatan berada pada kriteria sangat kurang.

Ketergantungan keuangan daerah juga masih sangat tinggi (sebaiknya <10%). menjadi hal utama dalam merealisasikan fungsi dan peran otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah tercermin dari peningkatan peran serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. PAD dijadikan sebagai indikator untuk mencapai target pembangunan dan sumber pendapatan utama bagi daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah mengindikasikan bahwa daerah telah memanfaatkan potensi secara optimal hal ini mempengaruhi percepatan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Kesuksesan program otonomi daerah tergantung bagaimana kemampuan daerah dalam mengefektifkan pengelolaan keuangan, Oleh sebab itu pengelola pemerintahan mampu mengembangkan potensi daerah di semua aspek serta menggali sumber-sumber pendanaan yang ada maupun yang potensial sehingga memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat.

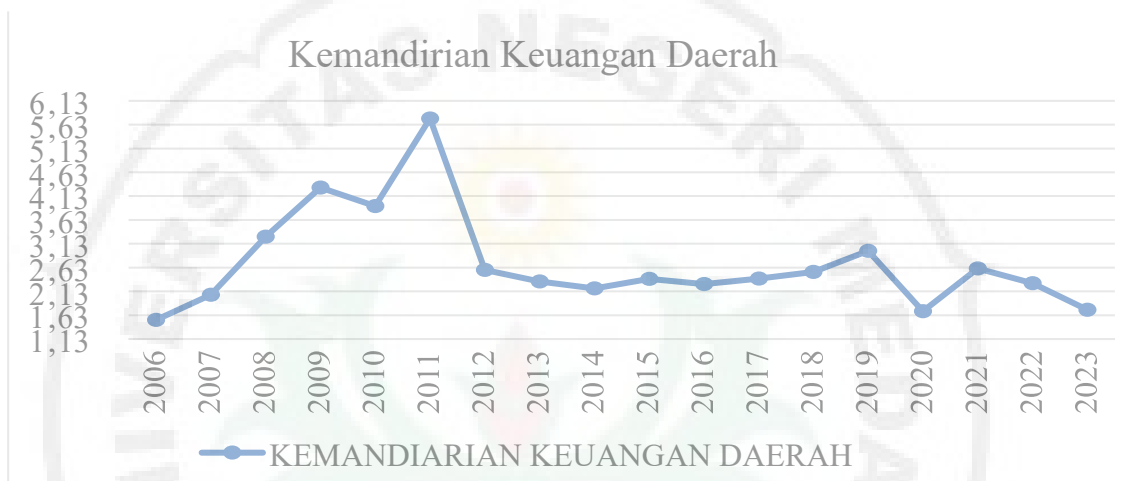
Mekanisme pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah mengutamakan pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki suatu daerah otonom. Keberhasilan suatu daerah dilihat dari bagaimana menjalankan keuangan daerah dalam menaggulangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah mampu secara efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan daerahnya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hidayat Tahawa et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, secara garis besar penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Kedua cara ini tetap membutuhkan pengelolaan APBD yang baik, namun cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara yang tidak langsung (melalui multiplier) ini masih terkendala banyak hal seperti birokrasi, alokasi anggaran, realisasi anggaran, tahapan dan waktu pengentasan kemiskinan yang panjang, dan sebagainya.

Selain itu, untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Nias Selatan cara yang paling mungkin dilakukan sebagai pendekatan untuk mengukur kemampuan setiap daerah, adalah dengan menggunakan cara langsung. Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui pembangunan yang dilakukan secara efektif dan efisien (Handayan et al., 2021) berikut grafik dibawah ini bagaimana kemandirian keuangan daerah di kabupaten Nias Selatan.



**Gambar 1.3 Grafik Persentase Kemampuan keuangan daerah di
Kabupaten Nias Selatan**



Sumber : BPS Nias Selatan 2006-2023

Sajian data grafik 1.3 di atas menunjukkan bahwa persentase kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami fluktuasi. Rasio kemandirian yang paling rendah terjadi di tahun 2006 yaitu hanya mencapai 1,53%% sementara yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai 5,76% dan tahun 2020 mengalami penurunan hingga mencapai 1,71%. Kemudia di tahun 2023 meningkat di 1,74%. Kemandirian keuangan Kabupaten Nias Selatan selama tahun anggaran 2006-2022 memiliki rata-rata sebesar 3%. Jika di ukur menggunakan skala pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, Kabupaten Nias Selatan memiliki skala interval 0–25 yang menunjukkan bahwa kemampuan keuangan yang rendah dan juga memiliki pola hubungan yang instruktif. Pola hubungan instruktif memiliki arti bahwa peranan pemerintah pusat masih mendominasi dari pada kemandirian

keuangan pemerintah daerah yang berarti daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara keuangan.

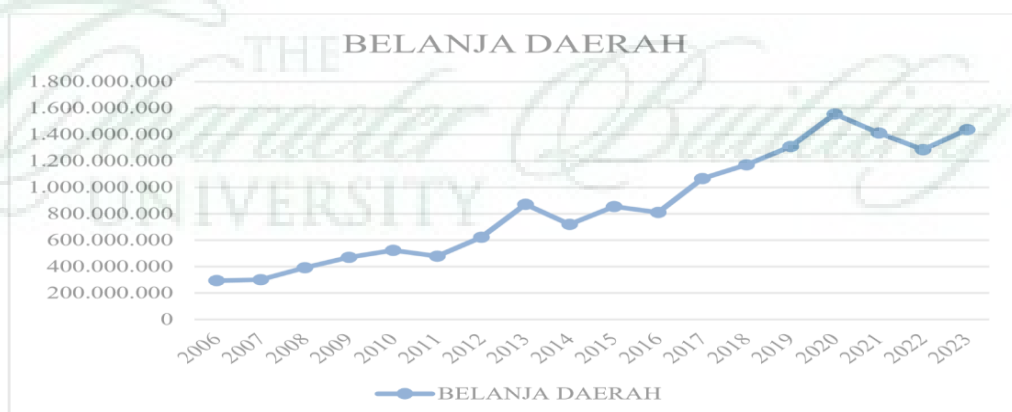
Kemandirian keuangan daerah menggambarkan bagaimana partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dimana semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Pengelolaan serta pemanfaatan anggaran yang baik oleh pemerintah daerah seharusnya mampu memberikan dampak baik pula pada kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus menekan jumlah kemiskinan di suatu daerah otonom. Salah satu permasalahan yang cukup krusial di Nias Selatan adalah masalah kemiskinan. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik Nias Selatan memiliki presentase jumlah angka kemiskinan yang tinggi di kab/kota Sumatera Utara.

Kemandirian keuangan daerah menginterpretasikan kesiapan pemerintah daerah mendanai pembangunan, pelaksanaan pemerintahan, dan pelayanan publik, hal ini mengakibatkan rendahnya keterlibatan pemerintah pusat dalam mengatur keuangan daerah. Pemerintah pusat berwenang serta berkewajiban memberikan sumber pendanaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan. Dana transfer daerah atau dana perimbangan menjadi sumber utama pendanaan pemerintah pusat. Parameter tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dibuktikan dengan mengkomparasikan PAD dan dana perimbangan, apabila PAD besar maka keterlibatan pemerintah pusat dalam mengatur keuangan daerah semakin kecil, dan sebaliknya (Aji et al., 2019)

Pemerintah daerah berkewajiban mengelola, mengeksplorasi, dan merealisasikan keuangan daerah sesuai kebutuhan skala prioritas berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan prinsip efektif dan efisien sehingga mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Indikator dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah (Febiandani & Suseno, 2016)

Belanja daerah bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang dilaksanakan pemerintah daerah. Peningkatan belanja daerah mempengaruhi kegiatan dan perluasan perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kebijakan fiskal dalam bentuk belanja daerah bertujuan menstimulus pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan (Sendow et al., 2018) Berikut grafik belanja daerah Nias Selatan .

Gambar 1.4 Grafik Realisai Belanja daerah di Kabupaten Nias Selatan



Sumber : BPS Nias Selatan 2006-2023

Pada gambar 1.3 Belanja Daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Belanja daerah tertinggi pada tahun 2020 dimana merupakan puncak pandemi covid 19. Pada tahun 2013 belanja daerah di Kab. Nias Selatan mengalami kenaikan drastis dengan nilai 871,660,788 dan turun pada tahun 2014 dengan jumlah 719,011,176 kemudian kembali berfluktuasi di tahun 2015 dan kemudian turun di tahun 2021 dengan nilai 1,411,390,000, dan 2022 turun menjadi 1,286,150,000. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembangunan supaya lebih maju dan berkembang secara pesat, baik itu dalam pembangunan infrastruktur desa terlebih dalam memberdayakan masyarakat desa itu sendiri

Penyediaan belanja daerah pada bidang pelayanan dasar akan memajukan pembangunan, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Belanja daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menstimulus perekonomian daerah sehingga mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah, kesejahteraan masyarakat, dan kemiskinan agar hasilnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat khususnya terhadap penduduk miskin. Belanja daerah berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan apabila alokasi belanja daerah tepat sasaran (Zakariya, 2016).

Sedangkan belanja daerah di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan trend cenderung positif atau mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih ada permasalahan dalam menjalankan otonomi daerah dikarenakan penerimaan yang didapat daerah belum optimal, hal ini menyebabkan kemiskinan di Kabupaten

Nias Selatan mengalami fluktuasi.

Kabupaten Nias Selatan bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara yang diserahkan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi yang ada, serta membuat kebijakan dan mengalokasikan APBD secara tepat guna. Otonomi daerah berperan penting dalam tahapan pembangunan, berarti daerah berkewajiban memperlancar dan mewujudkan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program skala prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, selaras dengan tujuan desentralisasi agar pemerintah mampu lebih cepat melayani kebutuhan dasar penduduk miskin, dengan membuat kebijakan dan mengalokasikan APBD secara tepat guna. Selain itu kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah cenderung mengalami peningkatan, tetapi kemiskinan di Nias Selatan termasuk tertinggi jika dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi kemiskinan melalui pengaruhnya terhadap komposisi anggaran atau belanja publik. Sumberdaya publik dapat ditransfer kepada masyarakat melalui program redistribusi pendapatan dan secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan pendapatan disposable mereka. Tentunya pelaksanaan

pemerintahan daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa mengetahui alokasi belanja yang tepat.

Dimana saat ini alokasi anggaran belanja daerah dibagi menjadi alokasi Belanja langsung, yang terdiri dari belanja modal, belanja barang jasa, dan belanja pegawai, alokasi belanja langsung ini juga sering dikenal dengan belanja pembangunan, dikarenakan alokasi anggaran yang ada di dalamnya benar-benar di alokasikan untuk pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Selain itu juga terdapat alokasi belanja tidak langsung, dimana pengalokasian anggaran ini lebih banyak ditujukan untuk alokasi belanja social, seperti belanja bantuan social, belanja pegawai, belanja transfer kepada pemerintah dibawah, dan lain-lain alokasi belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan. Dengan demikian peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktifitas faktor-faktor produksi. Melakukan peningkatan SDM yang dapat menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksi dan hasil-hasil produksi semakin meningkat (Aji et al., 2019).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, oleh sebab itu tujuan penelitian adalah untuk menyelidiki seberapa besar pengaruh kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang diuraikan diatas, ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2023 mengalami fluktuasi.
2. Kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Nias Selatan tahun 2009-2023 berada pada rentang 0.00% – 10.00% maka dikategorikan sangat kurang, hal ini mempengaruhi kesiapan keuangan daerah pada pelaksanaan otonomi daerah.
3. Kemandirian keuangan daerah berada pada rentang 0% - 25% maka dikategorikan pola hubungan instruktif, hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh pemerintah pusat lebih besar. Sedangkan belanja daerah di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan trend cenderung positif atau mengalami peningkatan setiap tahunnya.
4. Adanya permasalahan dalam menjalankan otonomi daerah dikarenakan penerimaan yang didapat daerah belum optimal, hal ini menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan masih tergolong tinggi.

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Kemiskinan serta variabel independen Kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan Belanja Daerah.

2. Data variabel digunakan pada tahun 2006-2023 di Kabupaten Nias Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Kemampuan Keuangan Daerah mempunyai dampak jangka panjang dan pendek terhadap Kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan antara tahun 2006-2023?
2. Apakah Kemandirian Keuangan Daerah mempunyai dampak jangka panjang dan jangka pendek terhadap Kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan antara tahun 2006-2023?
3. Apakah Belanja Daerah mempunyai dampak jangka panjang dan pendek terhadap Kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan antara tahun 2006-2023?
4. Apakah Kemampuan Keuangan Daerah, kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan dalam jangka panjang dan pendek?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan.

4. Untuk mengetahui Kemampuan Keuangan Daerah, kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan?

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini mampu memperoleh wawasan pengetahuan serta sebagai landasan bagi penelitian dibidang yang sama dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pihak Lain

Diharapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengaruh Kemiskinan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemiskinan di wilayah tersebut dalam mengambil keputusan ekonomi dan pembangunan di daerah yang menjadi fokus penelitian

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi dan pembangunan keuangan daerah yang lebih baik dan efisien serta membantu pemerintah melihat peluang ekonomi dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat dalam mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.